



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIES ARIANDI
2. Jabatan : CAMAT
3. NHK : 782060

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.255.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 163 m2/184 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , WARISAN Rp. 1.150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 285 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , WARISAN Rp. 955.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/35 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , WARISAN Rp. 85.000.000
4. Tanah Seluas 146 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **315.032.000**

1. MOBIL, SUZUKI MINI BUS Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
2. MOTOR, YAMAHA NMAX BJ8 - SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 35.032.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **103.140.788**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **2.673.172.788**

III. HUTANG **Rp.** **140.683.279**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **2.532.489.509**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.